

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALU

2015/2016



STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALU

2015/2016



STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALU 2015/2016

Katalog : 4101002.7271
ISSN : 2502-2547
No. Publikasi : 72710.1620
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 24 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kota Palu

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka evaluasi dan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang diperlukan suatu parameter yang dapat mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya.

*Untuk memenuhi maksud tersebut BPS Kota Palu berupaya menerbitkan publikasi "**Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palu 2015/2016**" yang merupakan kelanjutan dari publikasi yang telah diterbitkan secara rutin pada tahun-tahun sebelumnya.*

*Publikasi **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palu 2015/2016** menyajikan dan mengulas kondisi sosial masyarakat dan perkembangannya dari waktu ke waktu serta keterbandingan dengan daerah lain mengenai berbagai aspek, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan serta aspek- aspek sosial lainnya.*

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih sangat sederhana dan sudah barang tentu terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, sehingga sangat diharapkan masukan positif dari berbagai pihak guna kesempurnaan penerbitan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga publikasi ini dapat memberi manfaat kepada seluruh pembaca khususnya para pembuat kebijakan dan perencanaan serta dapat menjadi bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Palu, September 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU

KEPALA,



Ir. I NYOMAN DWINDU, M.Si
NIP. 19641015 199403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Ruang Lingkup.....	1
I.3. Sistematika Penulisan.....	1
I.4. Sumber Data	2
BAB II KEPENDUDUKAN	
II.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	4
II.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	4
II.3. Komposisi /Struktur Umur	5
BAB III KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
III.1. Derajat Kesehatan (Morbiditas)	8
III.2. Penolong Persalinan	9
III.3. Air Susu Ibu (ASI)	11
III.4. Keluarga Berencana	12
BAB IV PENDIDIKAN	
IV.1. Partisipasi Pendidikan	15
IV.2. Angka Melek Huruf	16
IV.3. Tingkat Pendidikan	17
IV.4. Sarana dan Prasarana	18
BAB V PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	
VI.1. Kualitas Bangunan	20
VI.2. Fasilitas Bangunan	21
BAB VI PENGELUARAN/KONSUMSI	
VI.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan	23
VI.2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan	23

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palu Tahun 2000 - 2015	4
Tabel II.2.	Rata-rata Kepadatan Penduduk Kota Palu Tahun 2015	5
Tabel II.3.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sek Rasio Tahun 2015	6
Tabel II.4.	Penduduk Kota Palu menurut Kelompok Umur Tahun 2010 dan 2015	7
Tabel III.1.1	Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Tahun 2015	8
Tabel III.1.2.	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu dan Lamanya Hari Sakit 2015	9
Tabel III.1.3	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin tahun 2015	9
Tabel III.2.	Persentase Penolong Kelahiran Menurut Darah Tahun 2015.....	10
Tabel III.3.1.	Persentase Balita yang Disusui atau Tidak Disusui Tahun 2015....	11
Tabel III.3.2.	Persentase Balita Umur 2-4 Tahun yang Pernah disusui menurut Lamanya Disusui Tahun 2015.....	11
Tabel III.4.1.	Persentase Penduduk Usia 15 – 49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat KB Tahun 2015 ...	12
Tabel III.4.2.	Persentase Penduduk Usia 15 – 49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Sedang/Tidaknya Menggunakan Alat KB Tahun 2015 ...	13
Tabel IV.1.1.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kota Palu Tahun 2015	15
Tabel IV.1.2.	Partisipasi sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Palu Tahun 2015	16
Tabel IV.2.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis	17
Tabel IV.3.1	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015	17
Tabel IV.3.2	Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	18
Tabel IV.3.3	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	18
Tabel IV.3.4	Angka Partisipasi Murni Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	18
Tabel IV.4.1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kota Palu Tahun 2015	23
Tabel IV.4.2.	Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Sekolah di Kota Palu Tahun 2015/2009	23

Halaman

Tabel V.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap, Jenis Dinding dan Jenis Lantai Terluas yang Ditempati di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2015.....	21
Tabel V.2.1.	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Oleh Rumah Tangga Tahun 2015	22
Tabel V.2.2.	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Oleh Rumah Tangga Tahun 2015	22
Tabel V.2.3.	Persentase Penggunaan Fasilitas Penerangan Oleh Rumah Tangga Tahun 2015	22
Tabel VI.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan Tahun 2015	24
Tabel VI.2.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan Tahun 2015	24
Tabel VI.3.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2015	24

<https://palukota.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Distribusi Persebaran Penduduk Kota Palu Tahun 2015	5
Gambar 2. Piramida Penduduk Kota Palu Tahun 2015.....	7
Gambar 3. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Palu Tahun 2015.....	10
Gambar 4. Persentase Balita yang Pernah Disusui menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	11

<https://palukota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan yang sedang kita laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha di berbagai bidang. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya data dan ukuran-ukuran yang dapat mencerminkan keadaan/fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat kompleks. Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat kemajuan/ perkembangan dari faktor-faktor atau komponen-komponen penyusun aspek kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterbandingan tahapan pencapaian pembangunan antar wilayah/daerah dapat pula dicerminkan oleh indikator-indikator tersebut sehingga pada akhirnya gambaran tentang pencapaian suatu tahapan pembangunan dapat diperoleh.

I.2. Ruang Lingkup dan Tujuan

Statistik Kesejahteraan rakyat ini mencakup beberapa aspek bidang kesra yang biasa diukur, antara lain bidang kependudukan, fertilitas dan KB, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan serta pengeluaran dan konsumsi.

Publikasi ini dibuat sebagai upaya meningkatkan jenis publikasi bidang sosial. Melalui publikasi ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat di daerah ini sebagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, serta dapat menjadi bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

I.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015/2016 ini disajikan dalam 6 bab, yang mana setiap bab memuat suatu karakteristik sosial seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan serta Pengeluaran dan konsumsi.

Indikator-indikator kependudukan yang dibahas dalam Bab II menggambarkan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatannya, serta komposisi penduduk.

Indikator Kesejahteraan Rakyat yang mencakup masalah kesehatan diuraikan dalam Bab III yang meliputi derajat kesehatan, penolong kelahiran, Pemberian Asi dan lain-lain.

Indikator bidang pendidikan disajikan dalam Bab IV mencakup tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, rasio antara murid dan guru serta sarana pendidikan yang tersedia.

Dalam Bab V dibahas secara ringkas tentang indikator-indikator perumahan dan lingkungan, seperti jenis atap, jenis dinding, jenis lantai rumah dan fasilitas rumah lainnya.

Bab VI dari publikasi ini memuat indikator tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat konsumsi/pengeluaran rumah tangga.

I.4. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari beberapa sumber seperti:

1. Sensus Penduduk (SP) 2010
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas)

BAB II

KEPENDUDUKAN

Kependudukan merupakan satu dari beberapa faktor penting dalam masalah sosial ekonomi dan pembangunan. Jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk yang berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antar daerah merupakan perhatian utama pemerintah terkait tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Seorang ilmuwan (Malthus) mengemukakan masalah tersebut ketika melihat hubungan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk begitu pesatnya sehingga

mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan persediaan pangan mengikuti deret hitung. Akibatnya pertumbuhan jumlah penduduk secara terus menerus tanpa adanya intervensi (pengendalian) akan menimbulkan masalah/kesenjangan dalam hal penyediaan pangan penduduk.

Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang sudah sangat tinggi merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran, munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

II.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (Fertilitas), kematian (Mortalitas), dan perpindahan penduduk (*Migration*).

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (*in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*). Demikian halnya dengan penduduk Kota Palu, dari hasil sensus penduduk Tahun 2010 diketahui berjumlah 269.083 jiwa. Selanjutnya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 diketahui jumlah penduduk Kota Palu telah mencapai 337.999 jiwa, kemudian dari hasil proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Kota Palu mencapai 368.086 jiwa.

Tabel II.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palu Tahun 2010 s.d. 2015

Jenis Kela min	Jumlah Penduduk			Rata-rata Laju Pertumbuhan /tahun	
	SP. 2000	SP. 2010	Proyeksi 2015	2000- 2010	2010- 2015
L	135.263	170.322	185.105	1,62	1,61
P	133.820	167.677	182.981	1,61	1,23
L+P	269.083	337.999	368.086	1,70	1,42

Sumber: SP'00; SP'2010; Proyeksi Supas 2005

Jumlah penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Palu Timur, dimana pada tahun 2015 tercatat 18,82 persen, diikuti oleh Kecamatan Palu Selatan sebanyak 18,6 persen, Kecamatan Mantikulore sebanyak 16,79 persen, dan yang terendah di Kecamatan Tawaeli sebanyak 5,45 persen.

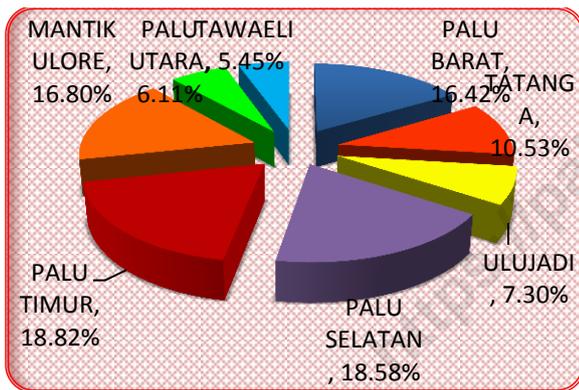
Laju pertumbuhan penduduk yang merupakan indikator dari tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kota Palu bervariasi antar kecamatan, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Palu Selatan dan yang terendah di Kecamatan Palu Timur. Rata-rata pertumbuhan penduduk dari Tahun 2000 – 2010 mencapai 1,70 persen, sedangkan pertumbuhan dari Tahun 2010 – 2015 mencapai 1,42 persen.

II.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk di wilayah Kota Palu tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, dimana Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas yang hanya menduduki urutan ke tiga dalam hal jumlah penduduk. Ini merupakan hal yang biasa sebagai ciri demografi yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan geografis.

Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat secara geografis sebagian besar wilayahnya terletak di perkotaan yang merupakan ibu kota Kota Palu, sementara itu Kecamatan Mantikulore walaupun sebagian wilayahnya merupakan daerah perkotaan yang juga merupakan pusat Ibu Kota Propinsi, namun sebagian besar wilayahnya (Poboya) merupakan daerah berbukit dan bergunung, bahkan sebagian terbesar wilayahnya merupakan hutan cagar alam.

Distribusi penduduk Kota Palu menurut Kecamatan terlihat seperti gambar berikut.



Gambar 1.

Distribusi Persebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2015

Kepadatan penduduk sangat tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah. Kecamatan Palu Timur memiliki wilayah terkecil namun jumlah penduduk terbesar. Hal ini mengakibatkan Kecamatan Palu Timur merupakan wilayah terpadat dengan rata-rata 8.983 Jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Palu Barat dengan kepadatan 7.302 jiwa/Km². Kecamatan Mantikulore yang memiliki wilayah terluas di Kota Palu, memiliki

kepadatan penduduk terkecil yaitu 299 jiwa/Km².

Tabel II.2. Rata-rata Kepadatan Penduduk Kota Palu Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Palu Barat	60 458	8,28	7 302
Tatanga	38 743	14,95	2 592
Ulujadi	26 883	40,25	668
Palu Selatan	68 385	27,38	2 498
Palu Timur	69 261	7,71	8 983
Mantikulore	61 826	206,80	299
Palu Utara	22 473	29,94	751
Tawaeli	20 057	59,75	336
Kota Palu	368 086	395,06	932

Sumber: diolah dari Proyeksi Penduduk SP2010

II.3. Komposisi/Struktur Penduduk

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat berbeda dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Kedua-duanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, dan masalah ketenagakerjaan.

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu disebut dengan "Sex Rasio" yang merupakan indikator untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya

dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Tabel II.3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Tahun 2015

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Palu Barat	30 259	30 199	60 458	100
Tatanga	19 652	19 091	38 743	103
Ulujadi	13 544	13 339	26 883	102
Palu Selatan	34 503	33 882	68 385	101
Palu Timur	34 337	34 924	69 261	98
Mantikulore	31354	30 472	61 826	103
Palu Utara	11 257	11 216	22 473	100
Tawaeli	10 199	9 858	20 057	103
Kota Palu	185 105	182 981	368 086	101

Sumber: diolah dari Proyeksi Penduduk SP2010

Walaupun diketahui sex rasio pada tingkat kecamatan bervariasi antara 98 sampai 103, namun secara kumulatif pada tingkat Kota Palu komposisi penduduk laki-laki masih lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, dengan rasio sex sebesar 101.

Berdasarkan struktur umur penduduk dapat diketahui tingkat ketergantungan antara penduduk yang belum/ tidak produktif dengan penduduk usia produktif dan untuk mengelompokan apakah penduduk pada suatu daerah tergolong dalam penduduk muda, *intermediate* atau penduduk tua, serta dapat

pula dilihat trend yang terjadi sebagai dampak positif dari pembangunan bidang kesehatan dan KB serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Rasio Ketergantungan Anak (*Child Dependency Ratio*) di Kota Palu Tahun 2015 tercatat sebesar 35,18 yang berarti bahwa terdapat sekitar 35 orang anak menjadi beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. Disisi lain penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (*Old Dependency Ratio*) Tahun 2015 di Kota Palu sebesar 4,09.

Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut digabungkan maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (*Dependency Ratio*) sebesar 39,28. Ini berarti setiap 100 yang berusia kerja (penduduk usia produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kota Palu. Pada Tahun 2010 penduduk dibawah usia 15 tahun mencapai 25,25 persen dari total penduduk

Kota Palu yang berjumlah 337.999 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2015 berdasarkan proyeksi SP2010 jumlah penduduk 362.202 jiwa terdapat sekitar 25,26 persen yang berusia di bawah 15 tahun.

Dengan demikian penduduk Kota Palu tergolong dalam penduduk Intermediet, dimana proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun berada di bawah 30 persen

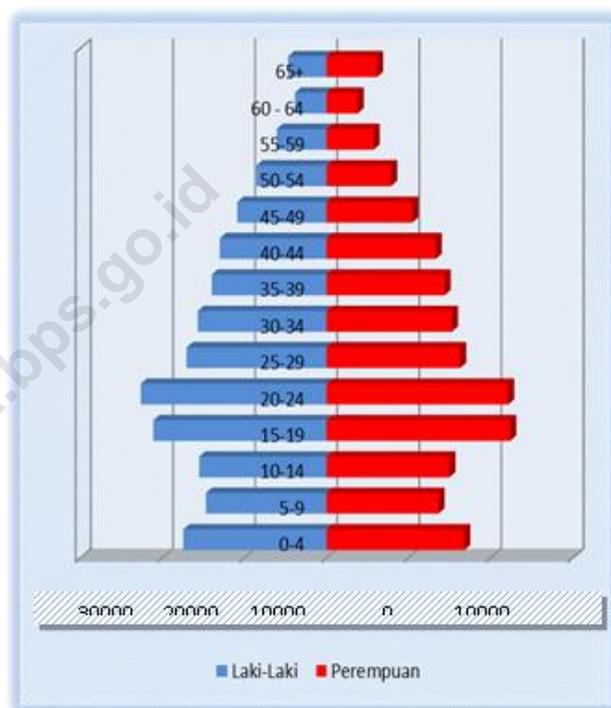
Disisi lain juga terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan sebanyak 884 orang atau naik sebesar 8,89 persen.

Tabel II.4 Penduduk Kota Palu menurut Kelompok Umur Tahun 2010 dan 2015

Kelompok Umur	Tahun	
	2010	2015
(1)	(2)	(3)
0-4	31.409	34.206
5-9	25.995	28.317
10-14	27.964	30.463
15-19	39.895	43.458
20-24	41.107	44.757
25-29	30.601	33.307
30-34	28.435	30.959
35-39	26.043	28.360
40-44	24.138	26.289
45-49	19.549	21.291
50-54	15.064	16.406
55-59	10.841	11.804
60-64	7.013	7.640
65+	9.945	10.829
Jumlah	337.999	368.086

Sumber: Proyeksi SP2010, tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap

Berdasarkan umur dan jenis kelamin penduduk Kota Palu masih menunjukkan ciri penduduk expansive dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda sebagaimana diperlihatkan pada piramida penduduk di bawah ini.



Gambar 2.

Piramida Penduduk Kota Palu Tahun 2015

BAB III KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Posyandu, serta penyediaan sarana air bersih.

Kemiskinan yang terjadi menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan dan gizi masyarakat, terutama keluarga miskin. Oleh karena itu pemerintah melakukan intervensi untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. Melalui upaya- upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Secara fisik kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat kesehatannya yang juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa aspek yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat antara lain: Angka Morbiditas, Proporsi anak masih hidup,

penolong persalinan, status gizi dan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel III.1.1. Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Tahun 2015

Jenis Kelamin	Keluhan Kesehatan	
	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)
Kota Palu		
- L	28,71	71,29
- P	28,04	71,96
- L+P	28,28	71,72
Sulawesi Tengah		
	29,21	70,79

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

III.1. Derajat Kesehatan (Morbiditas)

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan dapat dibedakan atas ada tidaknya keluhan kesehatan, jenis penyakit/keluhan yang dialami dan lamanya merasakan keluhan. Tabel III.1.1 menunjukkan persentase penduduk yang tidak dan yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan yang lalu.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa derajat kesehatan penduduk Kota Palu masih

cukup rendah, dimana kurang lebih 28,71 persen penduduk laki-laki dan 28,04 persen perempuan mempunyai keluhan kesehatan.

Keluhan kesehatan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi terutama bagi mereka yang telah bekerja, dan pada gilirannya akan menurunkan produktivitas. Disamping itu keluhan kesehatan tentunya akan berakibat pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan.

Sekitar 51,76 persen penduduk mengalami gangguan kesehatan kurang dari 4 hari, 42,17 persen merasakan gangguan 4-7 hari, dan yang mengalami gangguan 8-14 hari sebanyak 3,72 persen serta lebih dari 22 hari 2,11 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi pada seluruh daerah di Sulawesi Tengah, dimana lamanya terganggu kurang dari 4 hari paling banyak dialami masyarakat, yaitu sebanyak 47,43 persen, seperti terlihat pada tabel III.1.2.

Jenis penyakit yang banyak dikeluhkan oleh penduduk di Kota Palu Tahun 2015 adalah batuk dan pilek. Kemudian disusul dengan keluhan panas sebesar 20,08 persen. Secara umum sebaran persentase jenis keluhan sakit pada laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat dari tabel III.1.3

Tabel III.1.2. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu dan Lamanya Hari Sakit Tahun 2015.

Jenis Kelamin	Lamanya Menderita Sakit (Hari)				
	<4	4-7	8-14	15-21	22-30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Palu					
- L	52,45	41,32	3,32	0,22	2,69
- P	51,04	43,04	4,14	0,27	1,51
- L+P	51,76	42,17	3,72	0,24	2,11
Sulawesi Tengah					
	47,43	43,17	5,15	1,22	3,03

Sumber: diolah Susenas 2015

Tabel III.1.3. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin tahun 2015

Jenis Keluhan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	L+P
Panas	21,24	19,05	20,08
Batuk	24,20	19,86	21,90
Pilek	21,77	22,05	21,92
Asma	2,35	2,55	2,45
Diare	2,31	1,59	1,93
Sakit Kepala	8,34	10,89	9,69
Berulang			
Sakit Gigi	3,37	4,17	3,80
Lainnya	16,42	19,84	18,23

Sumber: diolah Susenas 2015

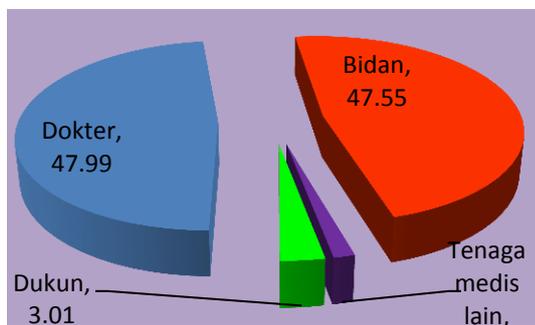
III.2. Penolong Persalinan

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu khususnya pada saat mengandung juga dipengaruhi oleh faktor lain, salah satu diantaranya adalah penolong kelahiran. Data tentang komposisi penolong

pada waktu melahirkan dapat menjadi salah satu indikator kesehatan ibu dan anak, serta indikator tingkat pelayanan kesehatan secara umum.

Secara teoritis bahwa penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan lebih baik terhadap kesehatan ibu dan anak dibandingkan yang dilakukan oleh dukun atau family dan lainnya. Hal ini sangat berhubungan dengan masalah kebersihan dan kelengkapan peralatan yang digunakan dalam proses tersebut.

Hasil survei menunjukkan bahwa persentase penolong kelahiran terbesar di Kota Palu umumnya sudah dilakukan oleh tenaga medis. Persalinan yang ditolong oleh dokter sebesar 47,99 persen, dokter sebesar 47,55 persen, dan tenaga medis lainnya sebesar 1,45 persen. Persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga medis (dukun) cukup rendah yaitu 3,01 persen.



Gambar 3. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Palu Tahun 2015

Secara umum proses penolong kelahiran di Kota Palu tahun 2015 lebih baik dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Tengah. Angka selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel III.2. Persentase Penolong Kelahiran Menurut Daerah Tahun 2015

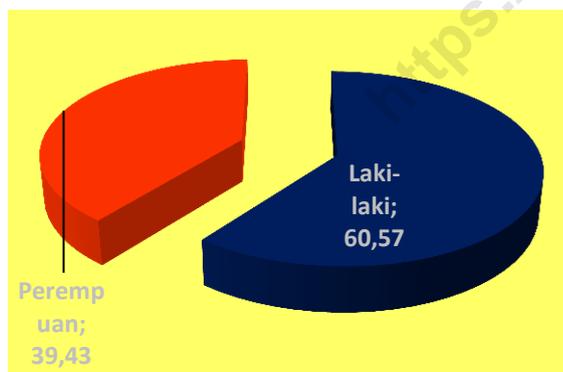
Daerah	Penolong Kelahiran				
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Famili/Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Palu	47,99	47,55	1,45	3,01	0,00
SulTeng	19,42	60,59	0,99	16,40	2,60

Sumber: diolah dari Susenas 2015

III.3. Air Susu Ibu (ASI)

Untuk memenuhi kebutuhan akan gizi balita pada awal masa pertumbuhannya telah tercukupi melalui pemberian ASI. Disamping sebagai sumber makanan, di dalam ASI juga terdapat zat yang dapat memberikan kekebalan alamiah yang tinggi pada bayi. Oleh karena itu pemberian ASI merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pemberian ASI pada balita dapat menjadi salah satu indikator kesehatan balita, disamping indikator-indikator lainnya.

Kesadaran akan pentingnya pemberian ASI pada balita di Kota Palu cukup tinggi. Balita laki-laki yang pernah disusui lebih besar persentasenya (60,57 persen) dibandingkan balita perempuan (39,43 persen).



Gambar 4 Persentase Balita yang Pernah Disusui menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Berdasarkan lamanya disusui untuk balita usia 2-4 tahun persentase terbesar adalah disusui lebih dari 24 bulan dimana angkanya mencapai 22,66 persen, urutan kedua adalah disusui selama 6-11 bulan dengan persentase

mencapai 20,11 persen. Sedangkan untuk bayi perempuan persentase terbesar adalah disusui lebih dari 24 bulan dengan angka 37,12 persen, dan urutan kedua adalah yang disusui antara 12-17 bulan dengan angka mencapai 21,55 persen.

Sementara itu hampir tidak ada lagi balita usia 2-4 tahun yang lamanya disusui kurang dari satu bulan. Secara keseluruhan persentase balita usia 2-4 tahun menurut lamanya disusui seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.3.1. Persentase Balita Usia 2-4 Tahun yang Pernah diberi ASI menurut Lamanya Disusui Tahun 2015

Lamanya disusui (bulan)	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1-5	32,43	27,77	30,49
6-11	36,76	30,20	34,03
12-17	17,08	31,31	23,00
18-23	13,73	10,72	12,48

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

III.4. Keluarga Berencana

Seperti telah diketahui bersama bahwa **Gerakan KB** yang awalnya dimulai dengan **Program KB** secara perlahan-lahan diharapkan akan menuju pada suatu kebutuhan yang sifatnya mendasar dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya gerakan KB secara keseluruhan akan menjadi **KB Mandiri**.

Namun sebagaimana diketahui pula bahwa dampak krisis ekonomi yang kemudian meluas menjadi krisis multidimensi tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak negatif terhadap gerakan KB yang selama ini dirasakan sangat besar manfaatnya. Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok juga diikuti oleh kenaikan harga bahan dan alat KB sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh daya beli sebagian penduduk, yang selanjutnya diduga akan berpengaruh terhadap jumlah akseptor KB.

Berdasarkan data tahun 2015 diketahui persentase penduduk perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menggunakan alat KB sebesar 65,96 persen, dan sisanya 34,04 persen tidak pernah menggunakan KB, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.1. Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat KB Tahun 2015

Penggunaan Alat Kontrasepsi	Perempuan Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin
(1)	(2)
Sedang Menggunakan	40,90
Tidak Menggunakan Lagi	25,06
Tidak Pernah Menggunakan	34,04
Kota Palu	100

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Penduduk yang pernah menggunakan alat/cara KB tidak selamanya menggunakan KB, hal ini dimungkinkan karena pada saat tertentu dapat saja melepas/ menghentikan penggunaan KB karena ingin mendapat keturunan, atau karena merasa tidak cocok dengan alat/cara KB yang digunakan atau karena alasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut setelah ditelusuri dengan pertanyaan lainnya, maka diketahui bahwa sekitar 40,90 persen wanita yang pernah menggunakan alat/cara KB pada saat survei dilakukan sedang menggunakan alat/cara KB, sedangkan sisanya sekitar 25,06 persen tidak sedang menggunakan.

Berdasarkan alat/cara KB yang digunakan, ternyata akseptor KB terbesar adalah yang menggunakan Suntikan KB yaitu mencapai 37,99 persen, diikuti

oleh yang menggunakan pil KB, sedangkan cara/alat yang paling kurang digunakan adalah Kondom, cara tradisional, dan MOP. Demikian halnya dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah, dimana pemakaian alat kontrasepsi dengan suntikan KB adalah yang terbesar yaitu mencapai 48,20 persen dan diikuti oleh yang menggunakan Pil KB sebesar 35,99 persen. Secara umum persentase penggunaan alat/cara KB seperti terlihat pada tabel III.4.2.

Tabel III.4.2. Persentase Penduduk Usia
15-49 Tahun dan Berstatus
Kawin menurut Cara/Alat KB
Tahun 2015

Jenis Alat/Cara KB	Wilayah	
	Kota Palu	Sulteng
(1)	(2)	(3)
MOW	4,65	1,59
MOP	0,00	0,06
AKDR/IUD	10,48	4,76
Suntikan KB	37,91	48,20
Susuk KB	6,21	7,09
Pil KB	32,81	35,99
Lainnya	7,94	2,31

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

BAB IV

PENDIDIKAN

Sumber daya manusia adalah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, karena manusia adalah merupakan faktor produksi aktif, sedangkan sumber daya alam merupakan faktor produksi yang bersifat pasif. Untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka perkembangan dan peningkatan sumber daya manusia mutlak diperlukan untuk menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan. Untuk maksud tersebut maka faktor pendidikan semakin besar peranannya.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, oleh karenanya kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD'45 dan GBHN, dimana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian maka sangat dirasakan bahwa pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan kesejahteraan penduduk.

Masalah pendidikan telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, terutama

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada pendidikan dasar pemerintah telah menyiapkan sarana pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah inpres untuk meningkatkan pemerataan pendidikan sampai ke pelosok daerah pedesaan. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun yang membebaskan biaya sekolah berupa SPP kepada anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Hal mana dimaksudkan untuk membantu agar penduduk yang kurang mampu tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya tanpa dibebani oleh pengeluaran biaya pendidikan. Selanjutnya program tersebut dimantapkan lagi dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan program tersebut diharapkan partisipasi sekolah untuk anak-anak usia tersebut akan menikmati pendidikan sampai pada tingkat sekolah lanjutan pertama.

IV. 1. Partisipasi Pendidikan

Hasil Susenas 2015 menunjukkan di Kota Palu masih terdapat sekitar 0,51 persen penduduk usia 10 tahun ke atas tidak/belum pernah sekolah. Sementara itu penduduk yang masih sekolah sebesar 29,53 persen, dan sisanya sekitar 69,96 tidak sekolah lagi.

Penduduk yang masih berpartisipasi dalam pendidikan (masih sekolah) sekitar 6,57 persen berada pada bangku sekolah dasar (SD), 6,94 persen pada sekolah lanjutan pertama (SLTP); 6,03 persen pada sekolah menengah umum (SMU); dan sisanya sekitar 9,99 persen berada di perguruan tinggi.

Dilihat dari data persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang masih sekolah nampak masing-masing 28,00 persen untuk laki-laki dan perempuan sebesar 31,00 persen. Dari data tersebut tercermin bahwa partisipasi sekolah perempuan secara keseluruhan lebih tinggi daripada laki-laki. Bila dilihat menurut tingkat pendidikan tinggi nampak pada jenjang pendidikan tinggi, dimana persentase penduduk perempuan yang masih sekolah lebih tinggi dari persentase penduduk laki-laki, yaitu masing-masing 10,04 persen untuk perempuan dan 9,94 persen untuk laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa sudah ada kesetaraan gender dalam bidang pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi.

Tabel IV.1.1. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan Tahun 2015

Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/ belum pernah sekolah	0,24	0,77	0,51
2. Masih Sekolah	28,00	31,00	29,53
a. SD	5,56	7,55	6,57
b. SLTP	6,99	6,90	6,94
c. SLTA	5,51	6,52	6,03
d. PT	9,94	10,04	9,99
3. Tidak Bersekolah Lagi	71,76	68,23	69,96
Total	100	100	100

Sumber : Diolah dari Susenas 2015

Dalam bidang pendidikan perbedaan jenis kelamin masih menjadi kendala, dimana peluang penduduk perempuan untuk memperoleh pendidikan lebih kecil dari laki-laki. Hal mana jelas terlihat pada penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 3 kali penduduk laki-laki, namun pada pendidikan tinggi gejalanya menunjukkan hal yang terbalik. Berdasarkan kelompok umur, maka partisipasi sekolah dapat terlihat seperti Tabel IV.1.2.

Tabel IV.1.2. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	2,71	0,81	1,74
7-12	37,99	38,94	38,47
13-15	16,76	17,94	17,36
16-18	15,10	15,23	15,17
19-24	22,56	23,47	23,02
25+	4,89	3,61	4,23
Kota Palu	100	100	100

Sumber: diolah Susenas 2015

Tingkat partisipasi sekolah mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka partisipasi sekolah semakin rendah dan sebaliknya.

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan hal tersebut diantaranya :

- Sarana pendidikan, dalam hal ini menyangkut ketersediaannya, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan jumlah sarannya semakin sedikit dan biasanya terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan, sehingga memerlukan transportasi dan bahkan tempat kos agar dapat lebih dekat dengan sekolah.
- Kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah, berdampak pada dua hal, yaitu: pertama, walaupun telah diupayakan sedemikian rupa oleh pemerintah untuk

meringankan biaya pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SLTP dengan menghapuskan pungutan SPP, tetapi pada kenyataannya masih sangat banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang bersangkutan untuk ikut terjun ke dalam dunia kerja guna membantu menambah pendapatan rumah tangga.

- Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih perlu lebih ditanamkan. Hal ini di samping berkaitan dengan masalah ekonomi juga sangat berkaitan dengan masalah budaya.

IV.2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (dapat membaca dan menulis) adalah merupakan refleksi dari partisipasi pendidikan oleh penduduk pada masa lampau. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh

kemampuannya dalam membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Kota Palu Tahun 2015 sudah cukup tinggi dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Tengah, namun demikian masih terdapat sekitar 0,38 persen penduduk usia 10 ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya dimana masih terdapat penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah.

Tabel IV.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	99,36	99,13	99,25
Huruf Arab	56,95	56,52	56,73
Huruf Lainnya	4,10	3,26	3,68
Buta Huruf	0,21	0,55	0,38

Sumber: diolah dari Susenas 2015

IV.3. Tingkat Pendidikan

Indikator lain dalam bidang pendidikan yang dapat menjadi ukuran besarnya peluang/kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan pada suatu tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk pada suatu daerah mencerminkan kualitas SDM daerah tersebut. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan mengasumsikan bahwa semakin banyak

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melalui pendidikan yang dijalannya, dengan demikian kualitas SDM-nya diharapkan lebih baik dibandingkan penduduk dengan pendidikan yang rendah. Demikian juga akses terhadap informasi dan kemajuan teknologi semakin besar.

Tabel IV.3.1 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015

Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Tamat SD	7,78	12,43	10,14
SD/Sederajat	17,44	18,40	17,93
SLTP/ Sederajat	17,31	17,21	17,26
SMU/MA	31,49	31,43	31,46
SMK	6,86	4,39	5,61
DI sd DII	0,79	0,72	0,75
DIII	2,56	3,12	2,84
DIV/Univ	15,54	11,54	13,50

Sumber: diolah dari Susenas 2015

Dari tabel di atas terlihat proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SMU (31,49%), untuk penduduk laki-laki dan (31,43%), untuk penduduk perempuan. Sedangkan yang memiliki ijazah perguruan tinggi (DI s.d. S3) untuk laki-laki sebesar 18,89% dan untuk perempuan sebesar 15,38%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel IV.3.2 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	102,51	96,52	99,42
SLTP	112,40	97,04	104,09
SMU	80,48	100,62	90,43
Universitas	10,25	11,04	10,64

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel IV.3.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	98,60	99,64	99,13
13-15	100,00	95,07	97,33
16-18	81,77	88,48	85,08
19-24	11,53	11,56	11,54

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel IV.3.4 Angka Partisipasi Murni Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	91,89	91,00	91,43
SLTP	91,76	71,40	80,74
SMU	77,04	78,13	77,58

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

APK SD di Kota Palu sebesar 99,42. Jika dibandingkan berdasarkan gender, APK SD dan SLTP Perempuan (96,52 dan 97,04) lebih kecil dibandingkan APK SD dan SLTP Laki-laki (102,51 dan 112,40). APK SMU perempuan lebih besar dari APK laki-laki, yaitu sebesar 100,62%.

Secara umum APM SD, SLTP dan SMU Kota Palu lebih besar dibandingkan APM Provinsi Sulawesi Tengah.

IV.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sarana dan prasarana pendidikan disini terbatas pada jumlah sekolah, guru, dan murid, serta indikator-indikator yang dihasilkannya seperti rasio murid terhadap guru, dan rasio murid terhadap sekolah. Pada Tahun ajaran 2014/2015 jumlah sekolah dasar dan sederajat tercatat 184 buah dengan 2.610 orang guru dan 43.036 orang murid. Sedangkan pada tingkat SLTP dan SMU/SMK jumlah sekolah, guru, dan murid lebih rendah dari sekolah dasar, sebagaimana terlihat pada Tabel IV.4.1. Rasio antara murid terhadap guru pada tingkat SD sebesar 16 yang artinya rata-rata setiap satu orang guru pada sekolah dasar mengajar 16 orang murid, sementara itu tiap sekolah rata-rata menampung 234 orang murid.

Tabel IV.4.1. Jumlah Sarana/ prasarana Pendidikan di Kota Palu Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	184	2 610	43 036
SLTP	72	1 915	21 056
SMU/MA	35	1 178	12 494
SMK	25	857	9 295

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu

Pada tingkat SLTP rata-rata setiap 1 orang guru mengajar 11 orang murid, sedangkan daya tampung untuk sekolah SLTP rata-rata sebanyak 292 orang murid, dan pada SMU/MA Rasio Murid Guru sebesar 11 dengan daya tampung rata-rata sebanyak 357 orang murid, sedangkan pada SMK rasio murid guru sebesar 11 dengan daya tampung murid rata-rata 372 orang (Tabel IV.4.2).

Tabel IV.4.2. Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Sekolah T.A. 2014/2015

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah
(1)	(2)	(3)
SD	16	234
SLTP	11	292
SMU/MA	11	357
SMK	11	372

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu

BAB V

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Di samping kebutuhan pangan dan sandang, kebutuhan akan perumahan (papan) adalah merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Rumah merupakan tempat berteduh dari cuaca panas dan hujan, tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga, tempat menyimpan barang-barang milik keluarga, dan merupakan ciri khas budaya, serta berbagai kegunaan lainnya.

Sekelompok penduduk yang membangun rumah akan membentuk lingkungan perumahan yang menimbulkan masalah lingkungan, baik masalah kesehatan maupun interaksi sosial dan budaya di antara penduduknya.

Kebutuhan akan perumahan kian bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, terlebih di daerah-daerah perkotaan. Permasalahan yang akhirnya timbul bukan hanya bagaimana membangun perumahan penduduk, tetapi juga bagaimana menyediakan lokasi pemukiman dan fasilitas sosial serta fasilitas lainnya yang tertata secara rapi agar tidak menimbulkan masalah sosial dikemudian hari.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembangunan perumahan yang semakin pesat adalah bergesernya penggunaan lahan yang semula sebagai lahan pertanian secara perlahan-

lahan berkurang karena digunakan sebagai daerah pemukiman, sehingga akan berdampak negatif pada produksi hasil pertanian. Di samping itu juga akan timbul masalah lingkungan alam yaitu pencemaran terhadap tanah dan air.

Untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari pembangunan perumahan, sangat diperlukan intervensi pemerintah dalam mengatur tata guna lahan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung lingkungan yang tersedia.

Perumahan dan fasilitas tempat tinggal/rumah merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraannya. Unsur-unsur rumah yang sering menjadi indikator perumahan adalah kualitas dan fasilitas bangunan.

5.1. Kualitas Bangunan

Melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2015 dikumpulkan beberapa informasi tentang perumahan seperti kondisi/jenis atap, jenis dinding dan lantai rumah yang digunakan oleh rumah tangga. Dari survei tersebut diperoleh hasil bahwa

sekitar 90,58 persen rumah tangga di Kota Palu menempati rumah beratap seng, kemudian atap beton sebesar 3,67 persen, dan atap genteng sebesar 3,13 persen.

Jenis dinding terluas yang dipakai terlihat bahwa 82,68 persen rumah yang ditempati menggunakan dinding tembok, 16,52 persen kayu, dan bahan lainnya 0,57 persen. Sementara itu persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas yang ditempati nampak bahwa 46,64 persen menempati rumah dengan jenis lantai marmer, jenis lantai 1,16 lantai kayu. Secara umum kondisi perumahan di Kota Palu relatif lebih baik dari kondisi perumahan di Sulawesi Tengah secara keseluruhan, hal mana terlihat dari beberapa indikator perumahan yang dipantau dalam survei seperti terlihat dalam tabel V.1.

V. 2. Fasilitas

Indikator-indikator fasilitas perumahan meliputi rumah tangga pengguna listrik, pengguna air bersih, fasilitas penampungan tinja dengan tangki septik. Indikator-indikator tersebut disamping sebagai salah satu indikator tingkat sosial ekonomi, juga berkaitan erat dengan masalah kesehatan lingkungan. Proporsi rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu mencapai 99,81 persen, angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Sementara itu terdapat

sekitar 66,30 persen rumah tangga telah memanfaatkan sumber air bersih dengan menggunakan air kemasan dan ledeng sebanyak 23,55 persen dengan pompa dan sumur terlindung.

Tabel V.1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap, Dinding, Lantai Terluas yang Ditempati di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2015

Indikator Yang Diamati	Daerah	
	Palu	SulTeng
(1)	(2)	(3)
Jenis Atap		
- Beton	3,67	1,07
- Genteng	3,13	2,21
- Asbes	1,75	1,28
- Seng	90,58	82,68
- Sirap	0,42	0,46
- Ijuk	0,45	12,08
- Lainnya	0,00	0,22
Jenis Dinding		
- Tembok	82,68	52,78
- Kayu	16,52	44,77
- Bambu	0,23	2,12
- Lainnya	0,57	0,33
Jenis Lantai		
- Marmer/Keramik	46,64	17,16
- Tegel	9,90	5,04
- Semen	41,98	54,62
- Kayu	1,16	17,89
- Tanah	0,00	3,81
- Lainnya	0,32	1,47

Sumber: diolah dari Susenas 2015

Untuk fasilitas lainnya yaitu tempat buang air besar terdapat sekitar 97,12 persen rumah tangga telah menggunakan leher angsa sebagai

tempat pembuangan tinja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel V.2.1 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Oleh Rumah Tangga Tahun 2015

Fasilitas Air Minum (1)	Daerah	
	Palu (2)	SulTeng (3)
- Air Kemasan/Leding	66,30	28,65
- Pompa/ Sumur Terlindung	23,55	23,73
- Sumur Tidak Terlindung	0,00	5,48
- Mata Air Terlindung	8,75	30,21
- Mata Air Tidak Terlindung	0,23	3,80
- Lainnya	1,17	8,22

Sumber : diolah dari Susenas 2015

Tabel V.2.2 Persentase Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Oleh Rumah Tangga Tahun 2015

Fasilitas Tempat Buang Air Besar (1)	Daerah	
	Palu (2)	SulTeng (3)
- Leher Angsa	97,12	89,00
- Plengsengan	2,43	2,71
- Cemplung	0,31	6,09
- Tidak Pakai	0,14	2,20

Sumber : diolah dari Susenas 2015

Tabel V.2.3 Persentase Penggunaan Fasilitas Penerangan Oleh Rumah Tangga Tahun 2015

Fasilitas Penerangan (1)	Daerah	
	Palu (2)	SulTeng (3)
- Listrik PLN	99,65	84,39
- Listrik Non PLN	0,16	7,96
- Bukan Listrik	0,19	7,65

Sumber: diolah dari Susenas 2015

BAB VI

PENGELUARAN/KONSUMSI

Tingkat kesejahteraan (bidang ekonomi) suatu rumah tangga atau penduduk dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atau penduduk yang bersangkutan. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh penduduk sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya konsumsi penduduk dalam Susenas melalui pendekatan pengeluaran.

Semakin tinggi pengeluaran penduduk baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan berarti pendapatan penduduk tersebut juga semakin tinggi, hal mana dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk bersangkutan akan semakin baik.

VI.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan

Mengingat bahwa tingkat pendapatan penduduk sangat bervariasi, maka dalam Susenas Tahun 2015 pengelompokan pengeluaran perkapita sebulan digolongkan 9 golongan seperti terlihat pada Tabel VI.1.

Untuk Kota Palu modus pengeluaran makanan berada pada golongan pengeluaran Rp.300.000 s.d 499.999,- per bulan atau sebanyak 35,16 persen, diikuti dengan golongan pengeluaran Rp. 500.000 s.d 749.000,-

sebanyak 23,09 persen, dan Rp. 200.000 s.d 299.999,- sebanyak 15,34 persen. Terdapat sebesar 0,14% penduduk pada kelompok pengeluaran lebih kecil dari Rp. 100.000,- ; 1,17 persen pada kelompok Rp. 100.000 s.d. 149.999,-; 4,78 persen pada kelompok Rp. 150.000 s.d. 199.999,-; 7,93 persen pada kelompok Rp.750.000 s.d. 999.999,-; 7,70 persen lebih Rp. 1.000.000,- Tabel VI.1. terlihat distribusi secara keseluruhan persentasenya lebih banyak berada pada golongan pengeluaran di atas Rp. 200.000 per bulan. Hal sama terjadi pada penduduk Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

VI.2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan

Sebagaimana disajikan pada Tabel VI.2. bahwa tidak ada penduduk Kota Palu dengan pengeluaran untuk konsumsi non makanannya pada kelompok pengeluaran lebih kecil dari Rp.200.000.-; 0,04 persen pada kelompok Rp. 200.000 s.d. 299.999,-; 0,34 persen pada kelompok Rp. 200.000 s.d. 299.999,-; 0,34 persen pada kelompok Rp. 300.000 s.d. 499.999,-; 1,35 persen pada kelompok Rp. 500.000 s.d. 749.999,-; 3,09 persen pada

kelompok Rp. 750.000 s.d. 999.999,-; 95,19 persen pada kelompok lebih Rp. 1.000.000,-

Pengeluaran konsumsi untuk non makanan di Sulawesi Tengah terkumpul pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 1.000.000,- per bulan.

Secara ekonomi terdapat hubungan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi pula persentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Sebaliknya jika pendapatan semakin rendah maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi, bahkan pada kondisi rumahtangga tertentu hampir semua pendapatannya dikeluarkan untuk pemenuhan konsumsi makanan.

Tabel VI.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita sebulan Tahun 2015

Golongan Pengeluaran (Rp)	Daerah	
	Palu	SulTeng
(1)	(2)	(3)
< 100.000	0,14	0,07
100.000 - 149.999	1,17	1,95
150.000 - 199.999	4,78	5,98
200.000 - 299.999	15,34	26,01
300.000 - 499.999	35,16	42,46
500.000 - 749.999	23,09	15,18
750.000 - 999.999	11,78	5,28
>=1.000.000	8,54	3,06

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel VI.2. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan Perkapita sebulan Tahun 2015

Golongan Pengeluaran (Rp)	Daerah	
	Palu	SulTeng
(1)	(2)	(3)
< 100.000	0,67	12,34
100.000 - 149.999	3,05	14,51
150.000 - 199.999	11,66	12,15
200.000 - 299.999	6,93	19,35
300.000 - 499.999	18,61	19,07
500.000 - 749.999	18,71	9,99
750.000 - 999.999	11,92	4,50
>=1.000.000	28,45	8,08

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel VI.3. Persentase Penduduk Menurut Total Golongan Pengeluaran Perkapita sebulan Tahun 2015

Golongan Pengeluaran (Rp)	Daerah	
	Palu	SulTeng
(1)	(2)	(3)
< 100.000	0,00	0,00
100.000 - 149.999	0,00	0,06
150.000 - 199.999	0,60	0,88
200.000 - 299.999	1,98	8,20
300.000 - 499.999	19,64	33,10
500.000 - 749.999	16,04	27,62
750.000 - 999.999	16,63	12,00
>=1.000.000	45,13	18,14

Sumber: Diolah dari Susenas 2015



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://palukota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU

Jl. Baruga no. 19, Telp (0451)422066, Fax (0451)421266
Email: bps7271@bps.go.id, Website: <http://palukota.bps.go.id>

ISSN 2502-2547



9 772502 254007